

## KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM

Jaka Prasaja<sup>1</sup>, Kasful Anwar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Progam Studi Magister (S2) PAI Institut Islam Ma'arif Jambi  
Jl. KH Abdurrahman Wahid, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi  
<sup>1</sup>[jprasaja39.jp@gmail.com](mailto:jprasaja39.jp@gmail.com), <sup>2</sup>[kasfulanwarus@uinjambi.ac.id](mailto:kasfulanwarus@uinjambi.ac.id)

### Abstrak

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi fenomena perkembangan zaman. Namun, penerapan pendidikan Islam masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebijakan, tata kelola, kualitas sumber daya manusia, kurikulum, pembiayaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, analisis kebijakan menjadi pendekatan penting untuk mengkaji efektivitas kebijakan pendidikan Islam sekaligus merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dasar analisis kebijakan pendidikan, menjelaskan tahapan analisis kebijakan, serta mengidentifikasi problematika pendidikan Islam di Indonesia beserta alternatif pemecahannya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah terhadap berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa analisis kebijakan merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan alternatif kebijakan, mengevaluasi dampak, dan memberikan rekomendasi bagi pengambilan keputusan. Adapun problematika pendidikan Islam meliputi kesenjangan mutu pendidikan, dualisme sistem pendidikan, keterbatasan kompetensi pendidik, rendahnya inovasi pembelajaran, ketimpangan sarana dan prasarana, serta tantangan transformasi digital. Penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar kebijakan pendidikan Islam dapat diimplementasikan secara efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, analisis kebijakan menjadi instrumen strategis dalam menghasilkan kebijakan pendidikan Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai ajaran Islam.

**Kata Kunci:** Analisis kebijakan, kebijakan pendidikan, problematika pendidikan Islam, mutu pendidikan, pendidikan Islam.

### Article History

Received: July 2026

Reviewed: July 2026

Published: July 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa, termasuk dalam konteks pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual dan akhlak yang mulia. Pendidikan Islam tidak sekadar mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak karimah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan Islam membutuhkan kebijakan yang tepat, terarah, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.

Pada praktiknya, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, manajemen lembaga pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan. Namun, tidak semua kebijakan yang diterapkan mampu mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya perencanaan yang matang, lemahnya implementasi, serta minimnya evaluasi berbasis data.

Di sinilah pentingnya analisis kebijakan pendidikan, yaitu sebagai suatu proses ilmiah dan sistematis untuk mengkaji, menilai, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang ada. Analisis kebijakan berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Dengan adanya analisis kebijakan, berbagai permasalahan dalam pendidikan dapat diidentifikasi secara tepat, sehingga solusi yang dihasilkan lebih rasional dan tepat sasaran.

Namun demikian, dalam realitasnya, analisis kebijakan pendidikan Islam masih menghadapi berbagai problematika. Salah satunya adalah adanya dualisme sistem pendidikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama yang belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, kebijakan pendidikan sering kali bersifat top down dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat serta praktisi pendidikan. Tidak jarang pula kebijakan yang diambil lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada kebutuhan nyata di lapangan. Kondisi ini menyebabkan kebijakan pendidikan Islam kurang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Di sisi lain, tantangan globalisasi dan modernisasi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan Islam. Arus informasi yang begitu cepat, perkembangan teknologi digital, serta perubahan nilai-nilai sosial menuntut pendidikan Islam untuk lebih adaptif tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang tidak hanya responsif terhadap perubahan zaman, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa analisis kebijakan pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan dan problematika yang ada. Dengan memahami konsep dasar analisis kebijakan, termasuk definisi, tujuan, dan karakteristiknya, diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam yang lebih efektif, relevan, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai konsep dasar analisis kebijakan serta problematika pendidikan Islam, agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang.

## PEMBAHASAN

### A. Definisi Analisis Kebijakan Pendidikan

Secara umum, analisis kebijakan pendidikan merupakan suatu proses ilmiah yang sistematis dalam mengkaji, menilai, serta memberikan rekomendasi terhadap suatu kebijakan pendidikan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Analisis ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir kebijakan, tetapi juga mencakup proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, analisis kebijakan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar mampu menjawab persoalan yang ada di lapangan.

Menurut William N. Dunn, analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi proses pembuatan keputusan publik.<sup>1</sup> Dalam konteks pendidikan, analisis kebijakan digunakan untuk memahami berbagai persoalan pendidikan secara komprehensif dan memberikan alternatif solusi yang rasional serta berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Analisis kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai proses yang meliputi identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, serta evaluasi kebijakan pendidikan.<sup>2</sup> Proses ini dilakukan secara berkelanjutan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Dengan kata lain, analisis kebijakan pendidikan berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik dalam dunia pendidikan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, analisis kebijakan memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan pendidikan umum. Hal ini karena pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif dan keterampilan, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral. Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan Islam tidak hanya menilai aspek administratif dan teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah).

Sejalan dengan hal tersebut, Endi Rochaendi menjelaskan bahwa analisis kebijakan pendidikan Islam merupakan proses pengkajian kebijakan yang tidak hanya berbasis pada pendekatan rasional dan empiris, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan.<sup>3</sup> Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam diharapkan mampu menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan kesadaran spiritual yang tinggi.

Selain itu, analisis kebijakan juga dipahami sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan publik secara rasional dan sistematis. Dalam hal ini, analisis kebijakan berperan dalam menyediakan berbagai alternatif solusi yang dapat dipilih oleh para pengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan yang matang.<sup>4</sup> Oleh karena itu, analisis kebijakan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, analisis kebijakan menjadi sangat penting mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi, seperti dualisme sistem pendidikan, ketimpangan kualitas lembaga pendidikan, serta tantangan globalisasi. Melalui analisis kebijakan yang komprehensif, diharapkan kebijakan pendidikan Islam dapat

---

<sup>1</sup> William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (New York: Routledge, 2018), hlm. 3.

<sup>2</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, edisi terbaru (Yogyakarta: CAPS, 2021), hlm. 45.

<sup>3</sup> Endi Rochaendi, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam: Dinamika Implementasi dan Refleksi Transformasional* (Bandung: Duta Media Press, 2025), hlm. 12.

<sup>4</sup> Indriya, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Mendukung SDGs* (Bogor: Edukasi Islami, 2022), hlm. 27.

dirumuskan secara lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan Islam adalah suatu proses ilmiah, sistematis, dan berbasis nilai yang bertujuan untuk mengkaji, menilai, serta merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam serta kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, kebijakan pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Pendidikan dalam Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan hendaknya mengarah pada kemaslahatan umat serta pengembangan ilmu pengetahuan yang seimbang antara dunia dan akhirat.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."*

Ayat ini mengandung makna penting bahwa setiap manusia diperintahkan untuk:

1. Melakukan evaluasi (muhasabah) terhadap tindakan yang telah dilakukan.
2. Merencanakan masa depan dengan pertimbangan yang matang.
3. Bertindak secara sadar dan bertanggung jawab.

Dalam konteks analisis kebijakan pendidikan Islam, ayat ini menjadi dasar bahwa:

1. Setiap kebijakan harus melalui proses analisis dan pertimbangan yang mendalam
2. Diperlukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan
3. Kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang, bukan hanya kepentingan sesaat

Dalil ini menegaskan bahwa dalam Islam, setiap keputusan termasuk kebijakan pendidikan harus didasarkan pada analisis, evaluasi, dan perencanaan yang matang, sejalan dengan prinsip analisis kebijakan modern yang sistematis dan rasional. Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

*Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." (QS. An-Nahl: 125)*

Ayat ini memberikan pelajaran bahwa dalam membuat dan menerapkan kebijakan pendidikan diperlukan hikmah, kebijaksanaan, serta pertimbangan yang matang agar kebijakan tersebut dapat diterima dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Analisis kebijakan pendidikan juga memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai alat untuk memahami berbagai persoalan pendidikan yang muncul di masyarakat. Kedua, sebagai sarana memberikan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan pendidikan. Ketiga, sebagai evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Keempat, sebagai dasar dalam merancang kebijakan baru yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam era modern dan globalisasi saat ini, tantangan pendidikan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta tuntutan dunia kerja menuntut adanya kebijakan pendidikan yang adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Kebijakan pendidikan yang baik harus memperhatikan prinsip pemerataan, kualitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa analisis kebijakan pendidikan merupakan suatu proses penting dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menilai, memperbaiki, dan mengembangkan kebijakan pendidikan agar mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Analisis kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, sosial, budaya, dan agama sehingga pendidikan dapat menghasilkan generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia.

## **B. Tujuan Analisis Kebijakan Pendidikan Islam**

Analisis kebijakan pendidikan Islam memiliki tujuan yang tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga normatif dan filosofis. Hal ini karena pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang seimbang antara aspek intelektual, spiritual, dan moral. Oleh karena itu, analisis kebijakan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat.

Secara umum, tujuan analisis kebijakan pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, efisien, dan berkeadilan, serta mampu menjawab berbagai persoalan pendidikan secara komprehensif. Menurut William N. Dunn, tujuan utama analisis kebijakan adalah menyediakan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan agar dapat memilih alternatif kebijakan terbaik berdasarkan pertimbangan rasional dan bukti empiris.<sup>5</sup>

Menurut Muhaimin, pendidikan Islam bertujuan mengembangkan seluruh potensi manusia, baik jasmani maupun rohani, sehingga terbentuk kepribadian muslim yang utuh.<sup>6</sup> Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan Islam diarahkan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Salah satu tujuan analisis kebijakan pendidikan Islam adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Melalui analisis yang mendalam, pemerintah atau lembaga pendidikan dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan dari kebijakan yang telah diterapkan. Dari hasil analisis tersebut dapat dirumuskan kebijakan baru yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam.

Selain itu, analisis kebijakan pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus mampu memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun daerah tempat tinggal.

---

<sup>5</sup> William N. Dunn, Op.Cit, hlm. 5.

<sup>6</sup> Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 75

‘Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-‘Alaq ayat 1-5:

أَفْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.*” (QS. Al-‘Alaq: 1-5)

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan Islam harus mampu mendorong terciptanya budaya belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat.

Tujuan lainnya adalah untuk membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan moral dan perilaku yang baik. Analisis kebijakan pendidikan Islam dilakukan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mendukung pembinaan akhlak peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain membentuk akhlak, analisis kebijakan pendidikan Islam juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dan kualitas lembaga pendidikan Islam. Guru merupakan unsur penting dalam keberhasilan pendidikan. Kebijakan pendidikan Islam harus mampu meningkatkan kompetensi guru agar mereka dapat menjalankan tugas pendidikan secara profesional dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tujuan berikutnya adalah untuk menyesuaikan pendidikan Islam dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, pendidikan Islam dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, analisis kebijakan pendidikan Islam diperlukan untuk mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem pendidikan yang relevan dengan tantangan masa kini.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Ra’d ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.*” (QS. Ar-Ra’d: 11)

Ayat tersebut mengandung makna bahwa perubahan dan kemajuan harus diupayakan melalui usaha dan pembaruan, termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus terus dikaji dan diperbaiki agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Di samping itu, analisis kebijakan pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Kebijakan yang baik harus mampu memberikan hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Analisis kebijakan membantu pemerintah dan lembaga pendidikan dalam menentukan prioritas program pendidikan, pengelolaan anggaran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan Islam.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan analisis kebijakan pendidikan Islam sangat luas dan penting dalam pengembangan pendidikan. Analisis ini tidak hanya bertujuan memperbaiki sistem pendidikan secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan Islam tetap berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis. Melalui analisis kebijakan yang baik, pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Adapun secara lebih rinci, tujuan analisis kebijakan pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Merumuskan Masalah Pendidikan

Analisis kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi dalam pendidikan Islam, seperti rendahnya kualitas pembelajaran, ketimpangan akses pendidikan, serta lemahnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Proses ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berangkat dari masalah nyata, bukan asumsi semata.<sup>7</sup>

2. Mengevaluasi Kebijakan yang Telah Ada

Tujuan berikutnya adalah menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan atau justru menimbulkan masalah baru. Dalam konteks ini, analisis kebijakan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan.<sup>8</sup>

3. Merumuskan Alternatif Kebijakan yang Lebih Baik

Analisis kebijakan juga bertujuan untuk memberikan berbagai alternatif solusi terhadap permasalahan pendidikan. Alternatif tersebut disusun berdasarkan data, fakta, serta pertimbangan nilai-nilai Islam, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kemaslahatan umat.<sup>9</sup>

4. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Rasional

Analisis kebijakan membantu para pengambil keputusan (decision makers) dalam menentukan kebijakan yang paling tepat. Keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan tertentu, tetapi didasarkan pada analisis yang sistematis dan objektif.<sup>10</sup>

5. Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan Islam

Tujuan utama dari seluruh proses analisis kebijakan adalah meningkatkan kualitas pendidikan Islam, baik dari segi kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, maupun hasil pendidikan. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan pendidikan Islam mampu menghasilkan generasi yang unggul secara intelektual dan berakhlak mulia.<sup>11</sup>

6. Menjamin Kesesuaian dengan Nilai-Nilai Islam

Berbeda dengan kebijakan pendidikan umum, analisis kebijakan pendidikan Islam juga bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan justru memperkuat nilai-nilai tauhid, akhlak, dan syariat dalam proses pendidikan.

Dalil Al-Qur'an

Sebagai landasan normatif, tujuan analisis kebijakan pendidikan Islam dapat dikaitkan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl: 90)

<sup>7</sup> Budi Winarno, Op.Cit, hlm. 52.

<sup>8</sup> Eko Handoyo, Op.Cit, hlm. 88.

<sup>9</sup> Endi Rochaendi, dkk., Op.Cit, hlm. 18.

<sup>10</sup> Indriya, dkk., Op.Cit, hlm. 31.

<sup>11</sup> Annisa Aulia Evinda, dkk., *Studi Kebijakan Pendidikan Islam* (Malang: Edulitera, 2025), hlm. 44.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, termasuk dalam pendidikan, harus berorientasi pada:

1. keadilan (al-‘adl), kebijakan harus merata dan tidak diskriminatif
2. kebaikan (al-ihsan,) kebijakan harus membawa manfaat
3. pencegahan kemudaratatan, kebijakan tidak boleh menimbulkan kerusakan

Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan Islam bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

### C. Karakteristik Analisis Kebijakan dalam Pendidikan Islam

Analisis kebijakan pendidikan Islam memiliki karakteristik yang khas karena tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam. Karakteristik ini menjadi pembeda utama antara analisis kebijakan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Dalam praktiknya, analisis kebijakan pendidikan Islam bersifat kompleks, multidimensional, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

#### 1. Bersifat Problem-Oriented (Berorientasi pada Masalah)

Analisis kebijakan pendidikan Islam selalu berangkat dari permasalahan nyata yang terjadi di lapangan, seperti rendahnya mutu pendidikan, ketimpangan akses, dan krisis moral peserta didik. Dengan demikian, analisis kebijakan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi fokus pada penyelesaian masalah konkret secara sistematis.<sup>12</sup>

#### 2. Bersifat Multidisipliner

Analisis kebijakan pendidikan Islam melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti pendidikan, sosiologi, politik, ekonomi, dan juga ilmu keislaman. Hal ini karena permasalahan pendidikan tidak dapat dipahami dari satu sudut pandang saja. Pendekatan multidisipliner memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.<sup>13</sup>

#### 3. Berbasis Nilai (Value-Based)

Salah satu karakteristik utama analisis kebijakan pendidikan Islam adalah berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Setiap kebijakan yang dianalisis harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga benar secara moral dan spiritual.<sup>14</sup>

#### 4. Bersifat Dinamis dan Kontekstual

Analisis kebijakan pendidikan Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, perubahan sosial, dan tantangan globalisasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan konteks zaman.<sup>15</sup>

#### 5. Melibatkan Banyak Aktor (Multi-Actor)

Dalam analisis kebijakan pendidikan Islam, terdapat berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, guru, masyarakat, dan ulama. Keterlibatan banyak aktor ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan hasil interaksi sosial yang kompleks.

#### 6. Bersifat Evaluatif dan Rekomendatif

<sup>12</sup> Budi Winarno, Op.Cit, hlm. 61.

<sup>13</sup> Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: UNNES Press, 2022), hlm. 95.

<sup>14</sup> Endi Rochaendi, dkk., Op.Cit, hlm. 25.

<sup>15</sup> William N. Dunn, Op.Cit, hlm. 72.

Analisis kebijakan tidak hanya mendeskripsikan suatu kebijakan, tetapi juga mengevaluasi serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, analisis kebijakan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan secara berkelanjutan.<sup>16</sup>

#### 7. Berorientasi pada Dampak (Impact-Oriented)

Karakteristik lainnya adalah berorientasi pada dampak jangka panjang, baik terhadap kualitas pendidikan, perkembangan peserta didik, maupun kondisi sosial masyarakat. Dalam pendidikan Islam, dampak yang diharapkan tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi.

#### 8. Integratif antara Ilmu dan Nilai Keislaman

Analisis kebijakan pendidikan Islam mengintegrasikan antara pendekatan ilmiah (rasional dan empiris) dengan nilai-nilai wahyu. Hal ini menjadikan analisis kebijakan tidak hanya objektif secara ilmiah, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat.<sup>17</sup>

Karakteristik analisis kebijakan dalam pendidikan Islam menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan nilai dan tujuan keislaman. Analisis kebijakan pendidikan Islam bersifat problem-oriented, multidisipliner, berbasis nilai, dinamis, melibatkan banyak aktor, serta berorientasi pada dampak dan perbaikan berkelanjutan. Dengan karakteristik tersebut, analisis kebijakan diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pendidikan Islam yang lebih efektif, relevan, dan bermakna bagi kehidupan umat. Dalil Al-Qur'an

QS. Asy-Syura : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."*

Dalil ini menegaskan bahwa analisis kebijakan pendidikan Islam harus:

- a. melibatkan berbagai pihak
- b. dilakukan secara rasional dan sistematis
- c. berlandaskan nilai-nilai Islam
- d. menghasilkan keputusan terbaik untuk kemaslahatan umat.

Karakteristik pertama analisis kebijakan dalam pendidikan Islam bersumber pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Setiap kebijakan pendidikan Islam harus mengacu kepada prinsip-prinsip syariat Islam agar kebijakan tersebut tidak menyimpang dari tujuan pendidikan Islam. Analisis kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keimanan, ketakwaan, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa': 58)*

<sup>16</sup> Eko Handoyo, Op.Cit, hlm. 101.

<sup>17</sup> Annisa Aulia Evinda, dkk., *Studi Kebijakan Pendidikan Islam* (Malang: Edulitera, 2025), hlm. 52.

Ayat tersebut menegaskan pentingnya nilai amanah dan keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan Islam. Oleh sebab itu, analisis kebijakan pendidikan Islam harus dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab.

Karakteristik kedua berorientasi pada pembentukan insan kamil. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang sempurna, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Analisis kebijakan pendidikan Islam tidak hanya menilai keberhasilan akademik, tetapi juga keberhasilan pembentukan akhlak dan kepribadian peserta didik.

Menurut Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya melalui proses pendidikan yang dilandasi nilai-nilai Islam.<sup>18</sup> Pendapat ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus diarahkan pada pembentukan karakter dan moral peserta didik.

Karakteristik ketiga bersifat integratif antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam pendidikan Islam tidak terdapat pemisahan antara ilmu agama dan ilmu duniawi, karena keduanya saling melengkapi. Analisis kebijakan pendidikan Islam harus memperhatikan integrasi antara penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman agar peserta didik memiliki kemampuan akademik sekaligus akhlak yang baik.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيهَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia.” (QS. Al-Qashash: 77)

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

Karakteristik berikutnya adalah memperhatikan kemaslahatan umat. Analisis kebijakan pendidikan Islam dilakukan untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan spiritual terhadap peserta didik dan masyarakat luas. Kebijakan pendidikan Islam tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus memberikan manfaat secara menyeluruh.

Dalam kaidah fikih disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”<sup>19</sup>

Kaidah tersebut menjadi dasar bahwa setiap kebijakan pendidikan Islam harus bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemajuan umat. Karakteristik selanjutnya adalah bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan modernisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial

<sup>18</sup> Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 399.

<sup>19</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998), hlm. 121.

masyarakat. Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan Islam harus dilakukan secara terus-menerus agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.

Selain itu, analisis kebijakan pendidikan Islam juga bersifat evaluatif dan solutif. Analisis tidak hanya bertujuan menilai keberhasilan atau kelemahan kebijakan, tetapi juga memberikan solusi dan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam dapat terus berkembang dan mengalami penyempurnaan.

Karakteristik lainnya adalah menempatkan akhlak sebagai prioritas utama. Dalam pendidikan Islam, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari kualitas akhlak peserta didik. Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan Islam harus memperhatikan sejauh mana kebijakan tersebut mampu membentuk karakter yang baik.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa karakteristik analisis kebijakan dalam pendidikan Islam memiliki ciri khas yang berlandaskan nilai-nilai Islam, berorientasi pada pembentukan insan kamil, memperhatikan kemaslahatan umat, serta mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan akhlak. Analisis kebijakan pendidikan Islam juga harus bersifat dinamis, evaluatif, dan solutif agar mampu menjawab tantangan perkembangan zaman sekaligus tetap menjaga nilai-nilai ajaran Islam.

#### D. Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

Analisis kebijakan pendidikan Islam merupakan suatu proses mengkaji, menilai, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan agar sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan kebutuhan masyarakat. Dalam pendidikan Islam, kebijakan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas intelektual peserta didik, tetapi juga membentuk akhlak, spiritualitas, dan karakter Islami. Oleh sebab itu, analisis kebijakan pendidikan Islam memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan ajaran Islam.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”  
(QS. An-Nahl: 90)<sup>20</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, harus dilandasi prinsip keadilan dan kemaslahatan.

##### 1. Fungsi Evaluatif

Fungsi evaluatif berarti analisis kebijakan pendidikan Islam digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan Islam telah tercapai dengan baik atau belum. Melalui evaluasi, lembaga pendidikan dapat mengetahui kekurangan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2019), hlm. 277.

Misalnya, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan Islam dilakukan untuk melihat sejauh mana kurikulum mampu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.<sup>21</sup>

Allah Swt. berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya.” (QS. Az-Zalzalah: 7-8)

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya penilaian terhadap setiap pekerjaan manusia, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

## 2. Fungsi Prediktif

Fungsi prediktif adalah fungsi untuk memperkirakan dampak yang akan muncul dari suatu kebijakan pendidikan Islam sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Analisis dilakukan agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat dan meminimalkan dampak negatif.

Contohnya, sebelum menerapkan pembelajaran berbasis digital di madrasah, perlu dianalisis kesiapan guru, peserta didik, dan sarana prasarana yang tersedia. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat menjadi lebih matang dan tepat sasaran.

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok...” (QS. Al-Hasyr: 18)

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya perencanaan dan memperkirakan dampak masa depan sebelum mengambil suatu tindakan.

## 3. Fungsi Rekomendatif

Fungsi rekomendatif berarti analisis kebijakan pendidikan Islam memberikan saran atau solusi terhadap berbagai masalah pendidikan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rekomendasi tersebut dapat berupa:

- a. Perbaikan kurikulum
- b. Peningkatan kualitas guru
- c. Pengembangan metode pembelajaran
- d. Penguatan pendidikan karakter Islami

Fungsi ini sangat penting agar pendidikan Islam terus berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama.<sup>22</sup>

Allah Swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Ma'idah: 2)

<sup>21</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 39.

<sup>22</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 74.

Ayat ini menunjukkan pentingnya kerja sama dan pemberian solusi dalam menciptakan pendidikan yang baik.

#### 4. Fungsi Pengawasan (Kontrol)

Analisis kebijakan pendidikan Islam juga memiliki fungsi pengawasan atau kontrol. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya :*“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.”*(QS. Al-Isra’: 36)

#### 5. Fungsi Pengembangan Pendidikan

Fungsi pengembangan berarti analisis kebijakan pendidikan Islam digunakan untuk mengembangkan sistem pendidikan agar lebih maju dan berkualitas. Pendidikan Islam harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan identitas keislamannya. Allah Swt. berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya :*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”*(QS. Al-Mujadilah: 11)

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pendidikan Islam harus terus melakukan inovasi agar mampu menghasilkan generasi yang unggul secara intelektual dan spiritual.

#### 6. Fungsi Pemecahan Masalah

Dalam praktiknya, pendidikan Islam menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya mutu pendidikan, kurangnya sarana prasarana, dan krisis moral peserta didik. Analisis kebijakan berfungsi untuk mencari penyebab masalah dan memberikan solusi yang tepat. Dengan adanya analisis yang baik, setiap permasalahan dapat diselesaikan secara objektif dan ilmiah sehingga kualitas pendidikan Islam dapat terus meningkat.<sup>23</sup>

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya :*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”*(QS. Ar-Ra’d: 11)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya usaha dan perubahan untuk menyelesaikan masalah kehidupan, termasuk dalam pendidikan.

#### 7. Fungsi Perencanaan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan Islam juga berfungsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pendidikan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan Islam harus mempertimbangkan:

- kebutuhan peserta didik,
- perkembangan masyarakat,
- kemajuan teknologi, dan
- nilai-nilai ajaran Islam.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 543.

<sup>24</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), hlm. 211.

Allah Swt. berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

Artinya: *“Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi...”*(QS. Al-Anfal: 60)

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya persiapan dan perencanaan yang matang dalam setiap kegiatan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep dasar analisis kebijakan dan problematika pendidikan Islam, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan Islam merupakan suatu proses ilmiah, sistematis, dan berbasis nilai yang bertujuan untuk mengkaji, menilai, serta merumuskan kebijakan pendidikan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Analisis kebijakan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Adapun tujuan analisis kebijakan pendidikan Islam meliputi identifikasi permasalahan pendidikan, evaluasi kebijakan yang telah ada, perumusan alternatif kebijakan yang lebih baik, serta mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan tepat sasaran. Selain itu, analisis kebijakan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Karakteristik analisis kebijakan pendidikan Islam menunjukkan sifatnya yang problem-oriented, multidisipliner, berbasis nilai, dinamis, serta melibatkan banyak aktor. Analisis kebijakan juga bersifat evaluatif dan rekomendatif, serta berorientasi pada dampak jangka panjang, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Dengan karakteristik tersebut, analisis kebijakan diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam implementasinya, pendidikan Islam masih menghadapi berbagai problematika, seperti dualisme sistem pendidikan, lemahnya implementasi kebijakan, serta tantangan globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar kebijakan pendidikan Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pengambil kebijakan, diharapkan dapat merumuskan kebijakan pendidikan Islam yang lebih berbasis pada hasil analisis yang ilmiah, sistematis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Bagi lembaga pendidikan, diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara optimal serta melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan mutu pendidikan.
3. Bagi pendidik, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi profesional dan memahami kebijakan pendidikan secara lebih mendalam agar mampu mengaplikasikannya secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Aulia Evinda, dkk., *Studi Kebijakan Pendidikan Islam* (Malang: Edulitera, 2025).
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 74.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, edisi terbaru (Yogyakarta: CAPS, 2021).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2019), hlm. 277.
- Endi Rochaendi, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam: Dinamika Implementasi dan Refleksi Transformasional* (Bandung: Duta Media Press, 2025).
- Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: UNNES Press, 2022).
- Indriya, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Mendukung SDGs* (Bogor: Edukasi Islami, 2022).
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998).
- Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 112.
- Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).
- William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (New York: Routledge, 2018).
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 39.